KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Penambahan Pimpinan Dinilai Bagi-Bagi Kursi
Tanggal : Sabtu, 07 September 2019
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Penambahan Pimpinan Dinilai Bagi-Bagi Kursi

Nasdem belum sepakat dengan alasan penambahan.

JAKARTA — Persetujuan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dinilai sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan. Pengamat politik Universitas Negeri Islam (UIN) Jakarta, Adi Prayitno, mengatakan, jika dilihat dari jumlah kursi yang ingin ditambah, yakni 10 kursi, mewakili jumlah fraksi yang ada di DPR ditambah satu perwakilan DPD.

"Penambahan pimpinan MPR mengakomodasi berbagai friksi politik yang terjadi selama pilpres mengeras," ujar Adi saat dihubungi, Jumat (6/9). Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia itu mempertanyakan urgensi dari penambahan pimpinan MPR. Pasalnya, MPR hanyalah lembaga kenegarawanan.

Dengan ditambahnya pimpinan MPR, Adi juga tak yakin hal tersebut akan berbuah positif. Sebab, hal itu hanya menambah jumlah pimpinan yang berasal dari fraksi lain. "Politik kita memang penuh kompromi, jika pun ada pertarungan sebatas sandiwara karena pada akhirnya semua berkongsi," katanya.

Maka dari itu, ia melihat hal tersebut sebagai cara dari elite politik di parlemen sengaja berlindung di balik MPR sebagai lembaga kenegarawanan. Untuk menutupi pembagian jatah kekuasaan secara vulgar. "Perang sengit hanya jelang pilpres setelah itu semua bergerombol bagi-bagi kekuasaan seakan tak pernah terjadi perang," kata dia.

Meskipun sudah disepakati sebagai usulan DPR dalam sidang paripurna, Kamis (5/9) kemarin. Fraksi Nasdem menunjukkan keengganan dilakukan revisi UU MD3 untuk menambah jumlah kursi MPR. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menilai fraksinya tak melihat ada urgensi untuk menambah jumlah pimpinan MPR.

"Kami belum temukan alasan yang kuat untuk mendukung gagasan menambah pimpinan MPR RI menjadi 10, sebagaimana usulan revisi dimaksud," ujar Johnny di Jakarta, Jumat (6/9).

Ia mengaku heran dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR yang ingin merevisi UU MD3. Padahal, undang-undang tersebut baru dibuat sebelum pemilihan umum. Menurut Nasdem, revisi UU MD3 belum tepat dilakukan saat ini. Sebab, UU tersebut belum sempat dijalankan oleh MPR, DPR, DPD, dan DPRD. "Sayang sekali jika UU MD3 akan direvisi kembali sebelum digunakan dan karenanya juga masuk akal jika muncul pertanyaan untuk apa beban kerja dan beban biaya yang dikeluarkan saat revisi terakhir," ujarnya.

> **Revisi UU MD3 sebagai sinyal positif dari Presiden Jokowi untuk merangkul semua partai di parlemen.**

Johnny berharap, fraksi di DPR yang setuju dengan revisi UU MD3 dapat memberi alasan yang rasional kepada masyarakat. Ia juga menegaskan, fraksinya akan terus mengawal proses revisi UU MD3 agar tak menjadi ajang bagi-bagi kekuasaan. "Tetap berharap terjaganya proses pembahasan dan proses politik yang *prudent* dan *accountable* di DPR RI," ujar Johnny.

Sementara, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berharap semua fraksi di DPR menyetujui penambahan pimpinan MPR. "Bagi fraksi yang belum setuju, saya kira masih perlu pendalaman. Secara perlahan diharapkan semua fraksi dan kelompok DPD akan menyepakati (penambahan pimpinan MPR)," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PAN Saleh Partaonan Daulay di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/9).

Saleh menjelaskan, revisi UU MD3 kemungkinan hanya akan mengubah satu atau dua pasal. Sehingga pihaknya ingin fraksi lain di DPR tak lagi mempersoalkan penambahan kursi pimpinan MPR. Jika semua fraksi sepakat terkait hal tersebut, revisi UU MD3 bisa segera dibawa ke sidang paripurna selanjutnya, agar DPR menyetujui untuk menjadi undang-undang.

Ia mengklaim Fraksi PAN sebagai pihak yang pertama kali mengusulkan penambahan pimpinan MPR pada awal periode 2019-2024. Maka dari itu, penyelesaiannya diminta dapat diselesaikan oleh DPR periode 2014-2019. Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengaku tak mempermasalahkan penambahan kursi pimpinan MPR. "Saya kira tidak ada masalah, kalau presiden memang setuju untuk itu," ujar Fahri.

Ia justru melihat revisi UU MD3 sebagai sinyal positif dari Presiden Joko Widodo untuk merangkul semua partai di parlemen seusai Pemilu 2019. Menurut dia, jika revisi tersebut disetujui, kemungkinan besar setiap pimpinan partai dapat menduduki kursi pimpinan MPR. "Saya sederhana mau menangkapnya sebagai mungkin sinyal rekonsiliasi dari Presiden Jokowi sehingga memberikan kesempatan kepada semua pimpinan partai untuk duduk di MPR," ujar Fahri. Diketahui, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3

■ nawir arsyad akbar **ed:** agus raharjo